



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

LAPORAN

**KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL**



TRIWULAN I TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyusun serta menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode awal tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 April 2025

Deputy Bidang Kemitraan dan
Standardisasi Halal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud & Tujuan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja.....	8
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.....	19
B. Kendala dan Tindak Lanjut.....	23
C. Realisasi Anggaran.....	23
D. Highlight Kinerja.....	27
BAB IV PENUTUP.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal merupakan salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada tahun berjalan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal telah merumuskan 1 (satu) Sasaran Program yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH dan 2 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal, 2) Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH.

Meningkatnya sasaran program Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi capaian pada triwulan I sebesar 18%.
- b. Persentase LPH yang terakreditasi utama capaian pada triwulan I sebesar 39%.
- c. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH capaian pada triwulan I sebesar 34%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Kemitraan dan Kerjasama pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati capaian pada triwulan I sebesar 45%.
- b. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati belum terdapat capaian.

Meningkatnya sasaran program Direktorat Standardisasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi capaian pada triwulan I sebesar 94%
- b. Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama capaian pada triwulan I sebesar 28%.

- c. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi capaian pada triwulan I sebesar 34%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Jaminan Produk Halal. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan program agar tetap selaras dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengembangkan standar penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, industri, pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, serta mitra internasional menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan layanan halal di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, dinamika perkembangan industri halal global menuntut adanya penyesuaian kebijakan, peningkatan kualitas standar, serta penerapan inovasi dalam sistem jaminan produk halal. Oleh karena itu, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kemitraan yang efektif, memperluas jejaring kerjasama strategis, dan memastikan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program peningkatan efektivitas kemitraan, kerjasama, dan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran

strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemitraan, kerjasama, dan standardisasi yang akuntabel, adaptif, dan berintegritas. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
5. Mendukung terwujudnya peningkatan efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH sesuai dengan sasaran strategis Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH yang dikembangkan dengan indikator Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, Persentase LPH yang terakreditasi utama, dan Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH.

C. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berada dibawah deputi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- Pelaksanaan administrasi deputi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas Subbagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

1. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
2. Direktorat Standardisasi Halal.

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Standardisasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- e. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan;
- g. Pelaksanaan administrasi direktorat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi tersebut mencerminkan tekad BPJPH untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. BPJPH berkomitmen membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam memperluas sektor halal nasional. Melalui strategi yang terencana dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin industri halal dunia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPJPH menetapkan tiga misi utama sebagai arah strategis penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan

Misi ini menegaskan komitmen BPJPH dalam menghadirkan layanan JPH yang memenuhi standar halal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penyelenggaraan JPH yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan JPH di dalam dan luar negeri untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan terintegrasi

Misi ini berorientasi pada penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun lintas negara, guna mempercepat harmonisasi standar halal

Indonesia dengan standar internasional. Melalui pengembangan sentra-sentra halal dan perluasan akses pasar global, BPJPH berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kerja sama strategis ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Misi ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik, sementara sikap adaptif mendorong inovasi berkelanjutan dalam kebijakan, layanan, dan sistem manajemen. Dengan tata kelola yang efektif dan modern, BPJPH diharapkan mampu menjadi institusi penyelenggara JPH yang unggul, terpercaya, dan berkelas dunia.

Berdasarkan visi misi di atas, dalam menerapkan arah kebijakan dan strategi BPJPH, Deputi Bidang kemitraan dan standardisasi mengambil peran dalam Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi:

- a. Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH;
- b. Peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
- c. Peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
- d. Pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
- e. Penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
- f. Penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
- g. Peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
- h. Peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
- i. Peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;

- j. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
- k. Peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerjasama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
			b Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%

			c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%
2	DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
			b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%
3	DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
			b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
			c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja (disebut PK tingkat organisasi).

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Setiap sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam PK harus didukung oleh kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kepala Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025–2029. Adapun rincian target kinerja kegiatan Deputy ini mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%
		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja

dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJASAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Kemitraan dan Kerjasama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Standardisasi Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	A. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi		5	12	24,6	35	55	70,1	74	77	83,4	86	87	88	37.236.122.000	
		NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen											
		1	7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal	051 - Layanan Kemitraan Jaminan Produk Halal	A - Strategi Akselerasi kerja sama Sertifikasi Halal tingkat Daerah											17.000.000	
					B - Penguatan kerja sama Jaminan Produk Halal dengan Mitra Strategis											315.098.000	
					C - International Halal Forum											2.057.597.000	
					D - Pelaksanaan Koordinasi kerja sama di Bidang Jaminan Produk Halal											1.635.150.000	
					E - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal											1.398.411.000	
					F - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU/PKS/MRA											334.837.000	
					052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU		A - Koordinasi Pengembangan kerja sama KSO/KSM dengan Instansi Terkait										

		C - Pembahasan Pengembangan Bisnis BPJPH	190.980.000
		D - Pengadaan Jasa Tenaga Pengelolaan Layanan UPB BPJPH 2025	126.056.000
		E - Pengelolaan UPB BPJPH	79.100.000
		F - Penyelesaian Rancangan PKS/MoU/MR	559.590.000
		X - EFISIENSI - REKONSTRUKSI	27.245.169.000
		A - Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terkait Jaminan Produk Halal	568.093.000
		B - Review Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Jaminan Produk Halal	261.010.000
		D - Diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal	1.869.733.000
		E - Telaah Halal: Esensi kewajiban sertifikat halal dalam kehidupan beragama yang moderat	9.900.000
		F - TIM Komite, Perumusan, dan Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal	148.410000
		G - FGD Penyusunan Rancangan, Harmonisasi, Finalisasi dan Verifikasi SKKNI Auditor Halal	189.450.000
		I - FGD Konvensi SKKNI	174.060.000
INDIKATOR KINERJA		TARGET	Anggaran
		B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12	(Rupiah)

14

					G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN	220,000,000
					H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal	274,200,000
					I - Forum Stakeholder Halal	1,536,210,000
					J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475,898,000
					L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884,639,000
					M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376,760,000
Total						47,766,196,000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya kualitas kemitraan & kerja sama kelembagaan bidang jaminan produk halal	A. Persentase kerja sama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	Subkomponen												28.274.373.000
			5,0	17,5	25	33,0	44,0	53	58,0	61,0	65	68,0	72	78,5	
		NO	Rincian Output		Komponen										
			7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal	052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU		A - Koordinasi Pengembangan Kerja Sama KSO/KSM dengan instansi terkait								56.478.000	
		1					C - Pembahasan Pengembangan Bisnis BPJPH								190.980.000
							D - Pengadaan Jasa Tenaga Pengelolaan Layanan UPB BPJPH 2025								126.056.000

1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	A. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi		5	14,5	37,5	43	45,5	50	57	59,5	62,5	77,5	83,5	89	3.220.656.000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7162.AFA.001 Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal	051 - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	A - Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terkait Jaminan Produk Halal												568.093.000
					B - Review Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Jaminan Produk Halal												261.010.000
					D - Diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal												1.869.733.000
					E - Telaah Halal: Esensi kewajiban sertifikat halal dalam kehidupan beragama yang moderat												9.900.000
					F - TIM Komite, Perumusan, dan Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal												148.410.000
					G - FGD Penyusunan Rancangan, Harmonisasi, Finalisasi dan Verifikasi SKKNI Auditor Halal												189.450.000
					H - FGD Konvensi SKKNI												174.060.000
					TARGET												ANGGARAN
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
2	Meningkatnya kualitas standardisasi halal	B. Persentase Lembaga Pemeriksaan Halal yang terakreditasi pratama		5	7	12	17	25	29	34	39	44,3	45	46,5	47	3.165.170.000	

penilaian kesesuaian JPH	NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	ANGGARAN											
	1	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	051 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	A - Diseminasi JPH Pada Stakeholder Halal B - Bimbingan Teknis Percepatan Pendirian LPH	2.104.461.000 1.060.709.000											
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
			C. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	5	12,5	21	26	39	56	59	60	62	63,5	64	65	7.364.904.000
			Komponen	Subkomponen												
				A - Asesmen dan Witness LPH												440.424.000
				B - Asesmen dan Witness LHLN												573.648.000
				C - Tim Akreditasi LPH/LHLN												1.206.247.000
				D - Rapat tim akreditasi LPH/LHLN												261.000.000
				E - Rapat Penilaian Hasil Asesmen LPH dan LHLN												462.440.000
				F - Pelatihan Asesor dan Penilai Akreditasi LPH dan LHLN												653.438.000
				G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN												220.000.000
				H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal												274.200.000
3	Meningkatnya kualitas penilaian kesesuaian JPH	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	052 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal - BLU													

			I - Forum Stakeholder Halal	1.536.210.000
			J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475.898.000
			L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884.639.000
			M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376.760.000
TOTAL				13.750.730.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Capaian kinerja organisasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran ini, akan dilakukan analisis mendalam yang mengaitkan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kinerja selaras dan mendukung perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Khususnya, kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dievaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang berlaku untuk periode 2025–2029, sebagaimana dirinci dalam Bab II. Rincian ini kemudian disajikan dalam tabel realisasi kinerja.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%	15,65%	18%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%	11,67%	39%
		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%	22%	34%

Pada Triwulan I, sasaran program Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama, dan standardisasi penyelenggaraan JPH menunjukkan capaian yang signifikan berada di bawah target pada seluruh indikator kinerja. Indikator Persentase kesepakatan kerja sama dalam dan luar negeri yang terimplementasi mencapai sebesar 18%.

Sementara itu, realisasi untuk Persentase LPH yang terakreditasi utama mencapai 39%. LPH yang terakreditasi utama yaitu BSPJI Lampung, BSPJI Ambon, LPH UIN Maulana Malik Ibrahim, LPH Poltekkes Kemenkes Makassar, LPH Labkes Sumatera Barat, Univ Airlangga, LPH Halal Nusantara, LPH Pharma Halal Center, LPH UIN Mataram, LPH Quality Syariah, LPH UNHAS, LPH NUHAC, LPH UIN Alauddin, LPH Halal Hero, LPH UIN KH Abdurrahman Wahid.

Adapun indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH mencapai 34%. LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH diantaranya yaitu HQC Italy, Halal Australia Pty Ltd, HFCE Belgium, NAHA, Halal Control GmbH, Halal Consulting SL Spain,, WAHA, HQC Germany, HQC Spain, Halal Food & quality, Shanghai Global Halal

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJASAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%	35%	45%
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%	0%	0%

Pada Triwulan I, Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan dan Kerjasama untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati mencapai 45%. Kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati diantaranya PKS Universitas Islam Asyasyafi'iyah, Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat), Bank Syariah Indonesia, Fatayat NU Depok, Indonesia Halal Partnership, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPK Halal Hero Ibnu Chaldun, LPK Halal Syari'ah Academy, LPK Jogja Tama

Tricita, Makmur Berkah Amanda Tbk., PT. Taspen Persero, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Central Asia, KADIN DKI Jakarta, PT Trans News Corpora (CNN Indonesia), Jemari, MoU Inovasi Hebat Teknologi, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian UMKM, KSO Sucofindo Surveyor Indonesia, dan Yayasan Rekat Cinta Indonesia,

Sementara itu, pada indikator kerja sama JPH luar negeri belum ada capaian. Hal ini terjadi disebabkan karena periode ini masih dalam proses persiapan kesepakatan kerja sama antara BPJPH dan mitra.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%	37,5%	94%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%	13,33%	28%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%	22%	34%

Pada Triwulan I, capaian Direktorat Standardisasi Halal pada indikator kinerja Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi mencapai 94%. Capaian ini didukung oleh telah ditetapkan beberapa NSPK, yaitu Keputusan Kepala BPJPH No. 35 Tahun 2025 tentang Kurikulum SDM Bidang Syariah LPH, Keputusan BPJPH No. 41 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dewan Syariah LHLN, serta Keputusan Kepala BPJPH No. 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi LPH. Sementara itu, persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi pratama mencapai 28%, dengan lembaga yang berhasil memperoleh akreditasi di antaranya LPH Poltekkes Kemenkes Makassar, LPH Labkes Sumatera Barat, Universitas Airlangga (penambahan ruang lingkup), LPH Halal Nusantara, LPH Pharma Halal Center, LPH Halal Hero, LPH UIN KH Abdurrahman Wahid, dan LPH UIN Mataram. Adapun untuk indikator persentase Lembaga Halal Luar

Negeri yang terakreditasi mencapai 34%, meliputi lembaga HQC Italy, Halal Australia Pty Ltd, HFCE Belgium, NAHA, Halal Control GmbH, Halal Consulting SL Spain, WAHA, HQC Germany, HQC Spain, serta Halal Food & Quality Shanghai Global Halal.

B. Kendala dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya pada kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul selama periode ini dan perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, antara lain:

1. Kesiapan sistem BPJPH dalam mengakomodir layanan akreditasi.
2. Konflik kepentingan sering muncul dalam proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga dibutuhkan fokus dan waktu yang memadai agar kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dapat tercapai.
3. Proses penyusunan dan penyesuaian substansi kerja sama yang masih berjalan, keterbatasan pemahaman legal drafting, serta ketidaksesuaian draft kerja sama.

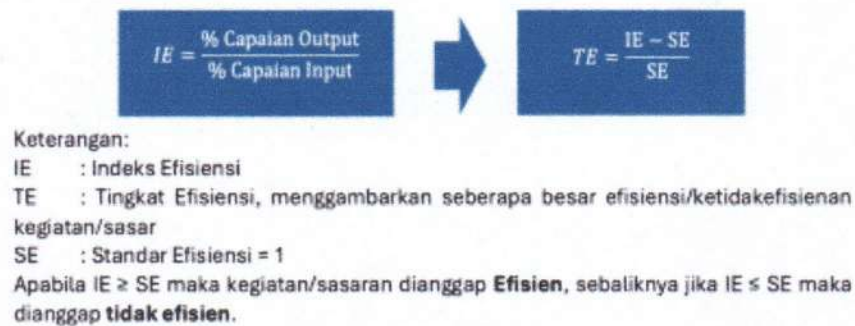
Upaya-upaya yang dilakukan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi dalam menghadapi kendala/permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengembangkan sistem BPJPH dalam mengakomodir layanan akreditasi.
2. Mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan persepsi dan mencari titik tengah atas perbedaan kepentingan yang muncul.
3. Pendalaman substansi, penyesuaian draft sesuai karakter kerja sama, serta penguatan kapasitas internal melalui koordinasi dan pembelajaran teknis.

C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan program dan kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal selama tahun berjalan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang harus efektif, efisien, dan akuntabel. Kinerja anggaran menjadi tolak ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi kelembagaan, dan komitmen Deputy terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sepanjang periode triwulan I Deputy bidang kemitraan dan standardisasi telah mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang terarah, serta proses pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan.

ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program. Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian input (realisasi anggarannya).



Gambar 3.4 Pengukuran Efisiensi Kinerja

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut;

- a. <0 = (Tidak Efisien);
- b. $0 - 0,2$ = 100%(Efisien);
- c. $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien);
- d. $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien);
- e. $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien);
- f. $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien);
- g. $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien);
- h. $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien);
- i. $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien);
- j. $1,61 - 1,8$ = 78%(tidak efisien);
- k. $>1,81$ = 75%(tidak efisien).

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	380.000.000	105.981.050	27,89%	18%	1	0
		b Persentase LPH yang terakreditasi utama	90.000.000	26.938.000	29,93%	39%	1	0
		c Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	130.000.000	0	0,00%	34%	0	-1

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi dibawah 0 hingga 1 dan tingkat efisiensi berkisar antara -1 hingga 0.

Untuk indikator Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, capaian anggaran sebesar 27,89% dan kinerja 18%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Untuk indikator Persentase LPH yang terakreditasi utama, capaian anggaran sebesar 29,93% dan kinerja 39% menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

Untuk indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH, capaian sebesar 0% dan kinerja 34%, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1, menandakan tidak efisien. Tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
-----	------------------	-------------------	------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	100.000.000	105.981.050	105,98%	45%	0	-1
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	280.000.000	-	0.00%	0%	N/A	N/A

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi 0 dan tingkat efisiensi berkisar -1.

Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati, capaian anggaran sebesar 105,98% dan kinerja 45%, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1. Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati, capaian anggaran sebesar 0% dan kinerja 0% menghasilkan indeks efisiensi N/A serta tingkat efisiensi N/A. Hal ini mengindikasikan belum ada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada periode ini.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	90.000.000	15.130.000	16,81%	94%	6	5
		b Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	-	11.808.000	N/A	28%	N/A	N/A
		c Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	130.000.000	-	0,00%	34%	N/A	N/A

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi 6 dan tingkat efisiensi sebesar 5.

Untuk indikator Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi, capaian anggaran sebesar 16,81% dan kinerja 94%, menghasilkan indeks efisiensi 6 serta tingkat efisiensi 5. Untuk indikator Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama, capaian anggaran N/A dan kinerja 28%, menghasilkan indeks efisiensi N/A serta tingkat efisiensi N/A, dan untuk indikator Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi, efisiensi kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 0% dan kinerja 34%, menghasilkan indeks efisiensi N/A serta tingkat efisiensi N/A, menandakan tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

D. Highlight Kinerja

Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan program kerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal. Kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan ini antara lain:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan Makkah Halal Forum 2025



Kegiatan ini adalah konferensi atau pertemuan internasional yang berfokus pada perkembangan industri halal global, sertifikasi, regulasi, dan peluang bisnis. Tujuannya adalah mempertemukan pemangku kepentingan (pemerintah, bisnis, akademisi) untuk berbagi wawasan dan mempromosikan produk/layanan halal.

- b. Kolaborasi BPJPH & Indonesia Halal Partnership Targetkan Fasilitasi 400 ribu Pelaku Usaha UMK Dapat Sertifikat Halal



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kolaborasi strategis dengan **Indonesia Halal Partnership (IHP)** yang menargetkan fasilitasi sertifikasi halal bagi **400.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)** guna mempercepat pertumbuhan industri halal nasional. Kerja sama ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sektor swasta lainnya untuk berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal global melalui ekosistem yang lebih inklusif bagi para pelaku usaha kecil.

- c. JEMARI Jalin Kerjasama dengan BPJPH untuk Tingkatkan Sertifikasi Halal di Jawa Barat



Perkumpulan Jembatan Masyarakat Indonesia (**JEMARI**) resmi menjalin kerja sama strategis dengan **BPJPH** melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Bandung pada 22 Maret 2025 untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM

dan pedagang di Jawa Barat. Dalam kolaborasi ini, JEMARI berperan sebagai organisasi pendamping dan penyelia yang akan menggerakkan jaringannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya label halal sebagai jaminan produk yang sehat, higienis, dan berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada triwulan pertama tahun 2025, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal masih berada dalam tahap awal perencanaan dan persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada koordinasi internal, penyusunan perangkat kerja, serta penyiapan sistem pendukung pelaksanaan program meningkatkan tata kelola dan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada Triwulan I Tahun 2025 belum menunjukkan realisasi kegiatan yang signifikan. Namun demikian, tahapan ini merupakan fondasi penting dalam memastikan kesiapan organisasi untuk melaksanakan program kerja secara optimal pada triwulan selanjutnya.

Dengan telah tersusunnya struktur organisasi, sistem administrasi, serta rencana kerja yang lebih terarah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkomitmen untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan perencanaan strategis guna mendukung pencapaian target kinerja BPJPH secara keseluruhan.